

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Bulan Oktober 2025, terjadi inflasi m-to-m sebesar 0,11%, inflasi y-on-y sebesar 4,46% dan inflasi y-to-d sebesar 3,61%.
 1. Penyumbang utama inflasi bulan Oktober 2025 secara m-to-m adalah kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil sebesar 0,09%.
 2. Komoditas penyumbang dominan inflasi secara m-to-m antara lain Cabai Merah, Emas Perhiasan, Uang Basah, Wortel, Jeruk.
 3. Penyumbang utama inflasi bulan Oktober 2025 secara y-on-y adalah kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil sebesar 3,90%.
 4. Komoditas penyumbang dominan inflasi secara y-on-y antara lain Cabai Merah, Emas Perhiasan, Beras, Santan Segar, Sewa Rumah.
2. Bulan November 2025, terjadi deflasi m-to-m sebesar 0,19%, inflasi y-on-y sebesar 3,88% dan inflasi y-to-d sebesar 3,41%.
 1. Penyumbang utama deflasi bulan November 2025 secara m-to-m adalah kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil sebesar -0,25%.
 2. Komoditas penyumbang dominan deflasi secara m-to-m antara lain Cabai Merah, Uang Basah, Jengkol, Beras, dan Tomat.
 3. Penyumbang utama inflasi bulan November 2025 secara y-on-y adalah kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil sebesar 3,42%.
 4. Komoditas penyumbang dominan inflasi secara y-on-y antara lain Cabai Merah, Emas Perhiasan, Ikan Tongkol/Ikan Ambu-ambu, Santan Segar, dan Beras.
3. Bulan Desember 2025, terjadi inflasi m-to-m sebesar 0,41%, inflasi y-on-y sebesar 3,83% dan inflasi y-to-d sebesar 3,83%.
 1. Penyumbang utama inflasi bulan Desember 2025 secara m-to-m adalah kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil sebesar 0,33%.
 2. Komoditas penyumbang dominan inflasi secara m-to-m antara lain Daging Ayam Ras, Bawang Merah, Cabai Rawit, Bensin, dan Telur Ayam Ras.
 3. Penyumbang utama inflasi bulan Desember 2025 secara y-on-y adalah kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil sebesar 3,30%.
 4. Komoditas penyumbang dominan inflasi secara y-on-y antara lain Cabai Merah, Daging Ayam Ras, Emas Perhiasan, Santan Segar, dan Beras.
4. Secara garis besar, **Kabupaten Mukomuko mengalami tren kenaikan inflasi sepanjang 2025**, terutama dipengaruhi oleh harga barang kebutuhan pokok, layanan makanan & minuman, serta biaya transportasi dan perawatan pribadi. Meskipun ada indikasi sedikit pelandaan di akhir tahun, tekanan harga masih tetap terasa. Tren ini sejalan dengan pola inflasi regional provinsi dan nasional.
5. Risiko ke depan cukup nyata, terutama dari fluktuasi pasokan pangan, biaya distribusi, dan kebijakan pendukung.
 1. Harga komoditas seperti cabai, ikan, beras cenderung fluktuatif karena musim tanam/panen, pasokan distribusi lokal, dan permintaan musiman. Tren ini *menjadi faktor utama mendorong atau menahan inflasi*.
 2. Kenaikan tarif angkutan, harga bahan bakar, atau biaya logistik dapat mendorong kenaikan biaya logistik barang kebutuhan pokok ke daerah, yang akhirnya memengaruhi harga konsumen.
 3. Akhir tahun sering diikuti dengan peningkatan konsumsi dan pergerakan warga,

sehingga potensi tekanan harga musiman bisa ikut mempercepat inflasi di periode Desember-Januari.

4. Kebijakan kenaikan upah di tingkat provinsi atau regional dapat memengaruhi permintaan konsumen dan struktur biaya, sehingga berpotensi berdampak pada inflasi daerah.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Karena Mukomuko bergantung pada pemenuhan kebutuhan masyarakat masih di datangkan dari daerah lain, **ketidakstabilan produksi lokal langsung berdampak pada inflasi pangan** sehingga Harga pangan sangat dipengaruhi oleh faktor **cuaca, musim panen, dan gangguan distribusi**, memperbesar tekanan pada harga kebutuhan pokok sedangkan **Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kontributor terbesar inflasi di Mukomuko** menunjukkan pasokan pangan.
2. Program pengendalian inflasi di daerah dikoordinasikan lewat TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah), tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada data harga lokal, sinergi antar instansi, dan real-time respons pasar.
3. Koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat berkaitan dengan intervensi pasokan atau subsidi terkadang kurang sinkron, sehingga respons terhadap gejolak harga membutuhkan waktu.
4. Perubahan harga pangan nasional, seperti kenaikan harga pangan pokok lainnya akibat kebijakan nasional atau kondisi global, **berdampak langsung pada inflasi daerah Mukomuko**.
5. Pemda dengan anggaran terbatas memiliki ruang kebijakan fiskal yang kecil untuk **intervensi pasar, subsidi lokal, atau program stabilisasi harga**.
6. Daya beli masyarakat tetap tertekan ketika harga kebutuhan pokok naik, sehingga risiko sosial ekonomi turut meningkat.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Mukomuko melaksanakan Rapat Tim Teknis TPID secara rutin dalam rangka memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilisasi dan memperkuat sinergi dalam mendukung pengendalian inflasi pangan.
2. Tim TPID melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko melakukan pemantauan ketersediaan pangan dan harga harga sembako rutin di pasar tradisional. Hal ini untuk memantau komoditas utama (beras, bawang merah, minyak goreng, cabai) harga dan pasokan pangan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko merilis/publikasi pelaksana program masing-masing dinas terkait dalam rangka Pengendalian Inflasi.
4. Tim TPID Kabupaten Mukomuko melaksanakan pemantauan pasokan dan harga pangan di Distributor. Hasil monitoring dari distributor, untuk ketersediaan terpantau aman serta harga bahan pokok lain relatif stabil. Kegiatan monitoring bahan pokok ini selalu dipersiapkan untuk mengantisipasi pergerakan harga, apabila terjadi kenaikan harga yang tidak wajar, baik disebabkan gangguan pasokan maupun distribusi bahan pangan.
5. Tim TPID melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko melaksanakan Operasi Pasar (Pasar murah) dan Dinas Ketahanan Pangan

Melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) di wilayah Kabupaten Mukomuko guna mengendalikan harga dan menekan inflasi serta untuk membantu masyarakat menyediakan kebutuhan pokok.

6. Tim TPID Kabupaten Mukomuko Melalui Dinas Pertanian Dalam Rangka Pendampingan Penyaluran Dan Serah Terima Bantuan Bibit Tanaman Buah-Buahan Unggul Bersertifikat Dari Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Untuk Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani Yang Tersebar Di Kabupaten Mukomuko.
7. Tim TPID melalui Dinas Ketahanan Pangan Melaksanakan Pemantauan dan Survey Harga dan Stok Komoditas Strategis di wilayah Kabupaten Mukomuko guna mengendalikan harga dan menekan inflasi serta untuk membantu masyarakat menyediakan kebutuhan pokok.
8. Tim TPID melaksanakan Capacity Building yang difasilitasi oleh Bank Indonesia di Semarang.
9. Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Mukomuko dengan Bulog.
- 10.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Upaya pasar murah bersinggungan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan relatif cepat meredam lonjakan harga komoditas pokok di periode tertentu, Namun, frekuensi pasar murah dan jumlah ketersediaan barang masih bergantung pada anggaran serta kerja sama logistik yang perlu ditingkatkan untuk cakupan yang lebih luas.
2. Bantuan mobil box dari Bank Indonesia memperkuat kapasitas logistik lokal dan mempercepat mobilisasi pasar murah ke daerah terpisah, Efektivitasnya tetap bergantung pada koordinasi antar dinas dan jangkauan wilayah operasi pasar murah itu sendiri.
3. Pemantauan harga merupakan kebijakan preventif yang penting untuk mendeteksi awal lonjakan harga, namun, pemantauan saja belum cukup jika tidak diikuti langkah aksi pasar atau intervensi pasokan yang lebih cepat.
4. Kolaborasi membantu menyatukan langkah antar pemda dan kelompok penyedia bahan pokok, Koordinasi perlu terus diperkuat terutama dalam perencanaan data stok komoditas secara tepat waktu
5. Intervensi pasar murah dan GPM membantu sedikit meredam lonjakan dan menjaga kestabilan harga relatif, namun inflasi tahunan masih menunjukkan tren tinggi khususnya pada komoditas pangan yang sensitif terhadap permintaan musiman, Indikasi sedikit penurunan pada November menunjukkan bahwa intervensi TPID bersama pasar murah dapat menahan gejolak harga secara moderat.
6. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Mukomuko **Triwulan IV 2025** menunjukkan bahwa langkah-langkah seperti pasar murah, GPM, dukungan logistik, dan pemantauan harga oleh TPID telah memberikan **pengaruh positif moderat** dalam meredam tekanan harga kebutuhan pokok, meskipun masih belum cukup menurunkan laju inflasi secara signifikan karena tantangan struktural dan permintaan musiman. Koordinasi dan peningkatan kapasitas data serta anggaran perlu diperkuat agar

kebijakan lebih efektif di masa mendatang.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Keterjangkauan Harga

- a. Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), lonjakan permintaan sering kali memicu kenaikan harga yang tidak terkendali.
- b. Optimalisasi Pasar Murah, Melanjutkan penyelenggaraan pasar murah di 15 kecamatan untuk mendistribusikan komoditas subsidi seperti beras, minyak goreng, gula, dan telur ayam.
- c. Sidak Pasar Secara Berkala, Melakukan pemantauan harga harian di pasar-pasar utama untuk mendeteksi dini spekulasi harga oleh pedagang besar atau distributor.

2. Ketersediaan Pasokan

- a. Mukomuko bukan merupakan daerah sentra produksi pangan utama untuk komoditas tertentu, sehingga ketergantungan pada pasokan luar daerah sangat tinggi.
- b. Penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) Mengonkretkan implementasi MoU dengan daerah sentra di Sumatera Barat dan Kerinci untuk menjamin pasokan rutin cabai, bawang merah, telur ayam dan daging ayam ras.
- c. Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Mendorong Gerakan Tanam Cabai di tingkat rumah tangga atau kelompok tani sebagai penyangga stok mandiri saat harga pasar melonjak tinggi.

3. Kelancaran Distribusi

- a. Geografi Mukomuko yang memanjang di pesisir barat menuntut jalur logistik yang stabil.
- b. Subsidi Transportasi, Jika terjadi lonjakan harga ekstrem akibat biaya angkut, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mensubsidi biaya distribusi pangan dari daerah asal.
- c. Koordinasi dengan Satgas Pangan untuk Memastikan jalur distribusi lintas provinsi (Sumbar - Kerinci) tidak mengalami hambatan pungutan liar atau kendala teknis yang dapat menghambat masuknya pasokan.

4. Komunikasi Efektif

- a. Mengelola ekspektasi masyarakat agar tidak terjadi pembelian dalam jumlah banyak perlu Iklan Layanan Masyarakat untuk mengimbau warga untuk berbelanja secara bijak melalui media sosial resmi dan radio daerah.
- b. Transparansi Harga, Mempublikasikan perkembangan harga harian melalui aplikasi atau kanal informasi TPID agar masyarakat mengetahui harga acuan yang wajar di tingkat eceran.